Science and Education Journal
Vol 5 No 3 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Analisis Tata Kelola Sekolah Dalam Implementasi Pendidikan Inklusi (Studi kasus Di SD Islam Al- Azhar 10 Serang)

Asih Widari[1], Dedi Mulia[2], Yuni Tanjung Utami[3]
[1]Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, asihwidari0608@gmail.com
[2]Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dedimulia@untirta.ac.id
[3]Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yunitanjungutami@untirta.ac.id

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif di SD Islam Al-Azhar 10 Serang yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan penelitian yaitu kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendamping khusus, serta pihak terkait dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif di SD Islam Al-Azhar 10 Serang telah berjalan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak. Sekolah menunjukkan komitmen dalam menerima peserta didik berkebutuhan khusus serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keberagaman. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara bersama antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler dengan penyesuaian layanan sesuai kebutuhan peserta didik. Evaluasi dan pengawasan dilakukan secara berkala melalui koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan dan menentukan tindak lanjut perbaikan. Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan inklusif meliputi Faktor pendukung meliputi dukungan orang tua dan penerimaan teman sebaya. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kompetensi pendidik yang belum merata, keterbatasan pelatihan, kurikulum yang masih mengacu pada sistem reguler, pembagian tugas yang belum jelas, kerja sama dengan pihak profesional yang masih dikembangkan, serta penyediaan GPK yang masih menjadi tanggung jawab orang tua.
Kesimpulannya, tata kelola pendidikan inklusif telah dilaksanakan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi, tetapi masih perlu diperkuat agar layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Kata Kunci: *Tata Kelola Sekolah, Pendidikan Inklusif, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, Sekolah Dasar*

Abstract

Inclusive education is the provision of education that provides opportunities for all students, including students with special educational needs, to receive educational services without discrimination. This study aims to analyze school governance in the implementation of inclusive education at SD Islam Al-Azhar 10 Serang, covering the aspects of planning, organizing, implementation, supervision and evaluation, as well as supporting and inhibiting factors in the implementation of inclusive education. This study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

documentation, involving the principal, classroom teachers, subject teachers, special education teachers, and other parties involved in the implementation of inclusive education as research informants. The results showed that school governance in the implementation of inclusive education at SD Islam Al-Azhar 10 Serang has been carried out through processes of planning, organizing, implementation, supervision, and evaluation involving various stakeholders. The school demonstrates a commitment to accepting students with special educational needs and creating a learning environment that supports diversity. The learning process is conducted jointly between students with special educational needs and regular students, with adjustments to educational services according to students' needs. Evaluation and supervision are conducted periodically through coordination to identify obstacles and determine follow-up actions for improvement. Supporting factors for the implementation of inclusive education include parental support and peer acceptance. Meanwhile, inhibiting factors include limited facilities and infrastructure, unequal educator competencies, limited training opportunities, a curriculum that still refers to the regular education system, unclear division of responsibilities, cooperation with professional parties that is still being developed, and the provision of special education teachers remaining the responsibility of parents. In conclusion, inclusive education governance has been implemented through planning, organizing, implementation, supervision, and evaluation; however, it still needs to be strengthened to ensure that educational services are appropriately aligned with students' needs.

Keywords: *School Governance, Inclusive Education, Students with Special Needs, Elementary School*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Hak tersebut berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Menurut Ikramullah dan Sirojuddin (2020), pendidikan inklusi merupakan perwujudan pendidikan untuk semua (*education for all*) yang memberikan kesempatan setara kepada setiap individu tanpa membedakan kondisi fisik, mental, sosial, emosional, maupun status ekonomi. Dengan demikian, pendidikan inklusi tidak hanya ditujukan bagi anak berkebutuhan khusus, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak pendidikan seluruh peserta didik.

Peningkatan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus mendorong pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusi yang berkualitas. Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2024, terdapat 17.132 satuan pendidikan inklusi pada jenjang sekolah dasar yang melayani sekitar 57.155 peserta didik berkebutuhan khusus (Diva Salma Hanifah et al., 2021). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya tata kelola sekolah yang efektif untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pendidikan peserta didik. Ikramullah dan Sirojuddin (2020) menjelaskan bahwa optimalisasi pendidikan inklusi dipengaruhi oleh peran kepala sekolah dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan strategis, serta komunikasi dan kolaborasi antara guru kelas, guru pembimbing khusus (GPK), dan masyarakat. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibel serta kompetensi sumber daya manusia turut menentukan keberhasilan pelaksanaannya.

Tata kelola sekolah merupakan proses sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Herawati dan Adiman (2020) menegaskan bahwa efektivitas

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

penyelenggaraan pendidikan membutuhkan sinergi antarkomponen organisasi serta pemahaman pimpinan terhadap tugas dan fungsi setiap bagian. Sejalan dengan itu, Habibah et al. (2025) menjelaskan bahwa tata kelola sekolah dilaksanakan secara terstruktur melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Ramadhan et al. (2025) juga menekankan bahwa tata kelola satuan pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam menjamin mutu layanan pendidikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan program pendidikan inklusi berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Permasalahan tata kelola pendidikan inklusi ditemukan dalam observasi awal di SD Islam Al-Azhar 10 Serang. Sekolah tersebut memiliki tiga peserta didik berkebutuhan khusus dengan karakteristik berbeda, yaitu hambatan emosi pada siswa kelas I Ar-Rahim, hambatan penglihatan pada siswa kelas II Al-Mu'min, dan hambatan pendengaran pada siswa kelas III Al-Baari'. Dua peserta didik memperoleh pendampingan GPK, sedangkan peserta didik dengan hambatan pendengaran tidak memiliki GPK karena tingkat hambatannya tergolong ringan. Permasalahan muncul ketika sekolah menetapkan kebijakan bahwa salah satu peserta didik berkebutuhan khusus tidak diperbolehkan bersekolah dan harus belajar di rumah apabila GPK tidak tersedia. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemenuhan hak pendidikan serta pengelolaan sumber daya manusia pada penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Kondisi tersebut perlu dikaji berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa pendidikan inklusif memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan hambatan fisik, mental, maupun potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama dalam lingkungan pendidikan yang sama (Mayya, 2019). Berdasarkan teori George R. Terry serta Herawati dan Supriyatna, tata kelola sekolah perlu dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis tata kelola pendidikan inklusi di SD Islam Al-Azhar 10 Serang, khususnya dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan, pembagian tugas dan tanggung jawab, implementasi program, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Penelitian ini juga mengkaji faktor pendukung dan penghambat yang berkaitan dengan sumber daya manusia, kebijakan sekolah, sarana dan prasarana, serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusi serta mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif dan adaptif.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola sekolah dalam implementasi pendidikan inklusi di SD Islam Al-Azhar 10 Serang. Secara khusus, penelitian mengkaji proses perencanaan, struktur pengorganisasian, pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan evaluasi, serta faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai tata kelola pendidikan inklusi di sekolah reguler. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi sekolah, referensi bagi guru dan GPK dalam meningkatkan koordinasi dan layanan pembelajaran, serta sumber informasi bagi orang tua dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis tata kelola sekolah dalam implementasi pendidikan inklusi di SD Islam Al-Azhar 10 Serang. Menurut Sugiyono (2020:9), penelitian kualitatif digunakan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

untuk memahami permasalahan melalui pengkajian objek dalam kondisi alami dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Sementara itu, Assyakurrohim dkk. (2023: 1) menjelaskan bahwa studi kasus bertujuan memahami suatu permasalahan secara mendalam melalui pengkajian terhadap kasus tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Menurut Hasanah (2016:21), observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti terlibat dalam aktivitas subjek penelitian untuk memperoleh informasi yang mendalam (Sugiyono, 2020: 227). Observasi dalam penelitian ini fokus pada tata kelola pendidikan inklusi, meliputi perencanaan dan kebijakan, pengorganisasian dan pembagian tanggung jawab, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi, serta faktor pendukung dan penghambat. Aspek tata kelola tersebut mengacu pada Herawati dan Supriyana (2024), yang menjelaskan bahwa pengelolaan dilakukan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam dan fleksibel mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi. Wijoyo (2022:9) menyatakan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi sesuai dengan topik penelitian, sedangkan Sugiyono (2020:233) menjelaskan bahwa wawancara semi-terstruktur memberikan kesempatan kepada informan untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya secara terbuka. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, dua guru pendamping khusus (GPK), tiga wali kelas yang mengajar peserta didik berkebutuhan khusus, dan dua peserta didik berkebutuhan khusus. Wawancara meliputi kebijakan perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan pembelajaran, pendampingan peserta didik, evaluasi, serta faktor pendukung dan penghambat pendidikan inklusi. Dokumentasi digunakan sebagai teknik pendukung untuk melengkapi dan mengonfirmasi data hasil observasi dan wawancara. Menurut Sugiyono (2020: 240), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan, dokumen tertulis, gambar, dan rekaman yang berkaitan dengan peristiwa yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto, video, rekaman wawancara, dokumen kebijakan pendidikan inklusi, data peserta didik berkebutuhan khusus, dokumen pembelajaran, serta catatan evaluasi dan perkembangan peserta didik.

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sugiyono (2020: 244) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasi dan menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya agar mudah dipahami. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan merangkum informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2020: 247). Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk pemahaman atau bentuk lain yang memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian (Sugiyono, 2022: 249). Tahap terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi melalui penelaahan kembali data berdasarkan temuan lapangan (Gemilang, 2016: 157). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Sugiyono (2020: 294), pengujian keabsahan data dalam penelitian mencakup kualitatif kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala sekolah, guru kelas, GPK, dan peserta didik berkebutuhan khusus, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan kedua teknik triangulasi tersebut mengacu pada Sugiyono (2020: 273–274) dan bertujuan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

meningkatkan kredibilitas serta memastikan kesesuaian informasi dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di SD Islam Al-Azhar 10 Serang yang berlokasi di Jalan Tb. Ma'mun No. 17, Kaujon, Kota Serang, Provinsi Banten. Sekolah swasta yang berdiri pada tahun 1995 ini berada di bawah jaringan pendidikan Al-Azhar dan mengintegrasikan kurikulum nasional dengan penguatan nilai-nilai Islam. Pelaksanaan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan akhlak, pelaksanaan ibadah, pengembangan karakter, dan keterampilan sosial peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan visi sekolah untuk mewujudkan cendekiawan muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas dalam penguasaan iman dan takwa (imtak) serta ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), sehat, kreatif, disiplin, percaya diri, unggul, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan negara. Untuk mencapai visi tersebut, sekolah berupaya menanamkan perilaku Islami, mengembangkan bakat dan minat peserta didik, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif melalui kerja sama dengan orang tua dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan observasi awal, SD Islam Al-Azhar 10 Serang menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan karakteristik hambatan yang beragam, meliputi hambatan penglihatan (tunanetra), hambatan emosi (tunalaras), dan hambatan pendengaran (tunarungu). Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus tersebut merupakan bagian dari upaya sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif di lingkungan sekolah reguler. Penelitian mengenai tata kelola sekolah dalam implementasi pendidikan inklusi dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2025/2026. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan kepala sekolah, guru kelas, guru pendamping khusus (GPK), dan peserta didik berkebutuhan khusus sebagai informan. Informasi dari berbagai pihak tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kebijakan sekolah dan penerapannya, terutama dalam perencanaan penerimaan serta penyediaan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan inklusi di SD Islam Al-Azhar 10 Serang diawali dengan komitmen sekolah untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan kepada setiap anak tanpa diskriminasi. Komitmen tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki hambatan dan/atau potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Berdasarkan hasil wawancara, kebijakan pemerintah dan imbauan dinas pendidikan menjadi salah satu pertimbangan sekolah dalam menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Pihak sekolah berpandangan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan bahwa penerimaan anak berkebutuhan khusus merupakan bagian dari tanggung jawab sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Selama tiga tahun terakhir, sekolah telah menerima tiga peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan yang berbeda, yaitu tunanetra, tunalaras, dan tunarungu, kemudian berupaya menyesuaikan layanan pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.

Dalam proses penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, sekolah melakukan beberapa tahapan yang diawali dengan komunikasi dan diskusi bersama orang tua untuk memperoleh informasi mengenai kondisi serta riwayat perkembangan anak. Selanjutnya, pihak sekolah berkoordinasi dengan kepala sekolah, bagian kurikulum, guru kelas, dan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran. Calon peserta didik kemudian mengikuti observasi prasekolah untuk mengetahui kemampuan, karakteristik, kesiapan, dan kebutuhan belajarnya. Hasil observasi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah dalam menentukan penerimaan peserta didik sekaligus merencanakan bentuk layanan pendidikan yang sesuai. Guru kelas dan GPK menjelaskan bahwa pertimbangan penerimaan tidak hanya didasarkan pada kondisi fisik anak, tetapi juga pada kemampuan dan kesiapan anak dalam mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, proses perencanaan penerimaan melibatkan komunikasi dengan keluarga, koordinasi internal sekolah, dan pengamatan terhadap kebutuhan peserta didik sebagai dasar untuk menentukan layanan pendidikan yang akan diberikan.

Perencanaan pendidikan inklusi juga melibatkan berbagai pihak, yaitu pimpinan sekolah, bagian kurikulum, pihak yang menangani kesiswaan, guru kelas, guru yang terlibat dalam pembelajaran, serta orang tua peserta didik. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diperlukan untuk mempertimbangkan kesiapan sekolah dan kebutuhan peserta didik sebelum pembelajaran dilaksanakan. Kepala sekolah menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan dengan melibatkan unsur pimpinan, kurikulum, kesiswaan, guru, dan orang tua. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah dalam menentukan langkah yang sesuai untuk mendukung proses pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, perencanaan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan peserta didik, tetapi juga mencakup pertimbangan mengenai pendampingan dan dukungan yang dibutuhkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Salah satu kebijakan khusus yang diterapkan SD Islam Al-Azhar 10 Serang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah kewajiban orang tua menyediakan guru pendamping khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan hasil wawancara, ketentuan tersebut dituangkan dalam kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pihak sekolah dan orang tua sebelum peserta didik mengikuti pembelajaran. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa peserta didik memperoleh pendampingan sesuai dengan kebutuhannya selama berada di lingkungan sekolah. Pihak sekolah, guru kelas, dan GPK menyampaikan bahwa keberadaan guru pendamping khusus merupakan bagian dari ketentuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan kondisi sekolah sebagai satuan pendidikan reguler yang memiliki keterbatasan dalam memberikan pendampingan individual kepada setiap peserta didik, sementara guru kelas harus memenuhi kebutuhan belajar seluruh siswa di kelas.

Keberadaan GPK dinilai penting untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti kegiatan pembelajaran dan memperoleh dukungan sesuai dengan kondisi masing-masing. Pendampingan diperlukan terutama ketika peserta didik membutuhkan bantuan lebih intensif yang tidak selalu dapat diberikan secara langsung oleh guru kelas. Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keberlangsungan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus masih berkaitan dengan ketersediaan GPK. Dalam kondisi tertentu, apabila GPK berhalangan hadir dan guru kelas tidak dapat memberikan pendampingan yang diperlukan karena harus melayani peserta didik lainnya, anak berkebutuhan khusus dapat diminta belajar dari rumah. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, kebijakan tersebut berkaitan dengan keterbatasan guru kelas dalam memberikan pendampingan individual secara bersamaan kepada seluruh peserta didik.

Secara keseluruhan, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan inklusi di SD Islam Al-Azhar 10 Serang mencakup komitmen menerima peserta didik berkebutuhan khusus, komunikasi dengan orang tua, observasi prasekolah, koordinasi antara pimpinan sekolah dan tenaga pendidik, serta

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

penetapan kebijakan penyediaan GPK. Proses tersebut menunjukkan adanya upaya sekolah untuk memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik sebelum menentukan bentuk layanan pendidikan yang akan diberikan. Meskipun demikian, kebijakan yang mewajibkan orang tua menyediakan GPK serta kemungkinan peserta didik belajar dari rumah ketika pendamping berhalangan hadir menunjukkan adanya tantangan dalam menjamin keberlanjutan layanan pendidikan inklusi. Dengan demikian, tata kelola perencanaan di sekolah ini telah mencakup sejumlah langkah dalam penerimaan dan pendampingan peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi pelaksanaannya masih bergantung pada ketersediaan guru pendamping khusus agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2025/2026, tata kelola sekolah dalam implementasi pendidikan inklusi di SD Islam Al-Azhar 10 Serang dianalisis berdasarkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, guru kelas, guru pendamping khusus (GPK), serta peserta didik berkebutuhan khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya menyelenggarakan pendidikan inklusif melalui perencanaan penerimaan peserta didik, koordinasi antarpihak, pelaksanaan pembelajaran bersama di kelas reguler, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan sarana dan prasarana, kompetensi tenaga pendidik, penyesuaian kurikulum, pembagian tugas, dan ketersediaan guru pendamping khusus.

Pada aspek perencanaan, SD Islam Al-Azhar 10 Serang menunjukkan komitmen untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan tanpa diskriminasi. Komitmen tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Selama tiga tahun terakhir, sekolah telah menerima tiga peserta didik berkebutuhan khusus dengan karakteristik hambatan penglihatan, hambatan emosi, dan hambatan pendengaran. Proses penerimaan diawali dengan komunikasi bersama orang tua untuk mengetahui kondisi dan riwayat perkembangan anak, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi bersama pimpinan sekolah, bagian kurikulum, dan guru yang akan terlibat dalam pembelajaran. Calon peserta didik selanjutnya mengikuti observasi prasekolah untuk mengidentifikasi kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan belajarnya. Hasil observasi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan penerimaan dan bentuk layanan pendidikan yang sesuai. Dalam perencanaannya, sekolah juga menetapkan kebijakan bahwa orang tua harus menyediakan GPK melalui kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan, meskipun pada praktiknya juga menunjukkan bahwa ketersediaan layanan pendampingan masih bergantung pada dukungan orang tua.

Pada aspek pengorganisasian, pelaksanaan pendidikan inklusif melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, guru kelas, GPK, dan orang tua peserta didik. Koordinasi dilakukan secara berjenjang untuk membahas perkembangan anak, kebutuhan pembelajaran, serta langkah pendampingan yang diperlukan. Guru kelas dan GPK bekerja sama dalam memberikan layanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, sedangkan orang tua berperan sebagai mitra sekolah dalam mendukung perkembangan anak dan menyediakan informasi mengenai kondisinya. Komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua berlangsung secara rutin sehingga permasalahan yang muncul dapat dibicarakan bersama. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan inklusif belum dituangkan secara formal dalam struktur organisasi atau dokumen tertulis. Pelaksanaan tugas masih mengandalkan koordinasi dan kesepahaman antar pihak. Temuan ini sejalan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dengan Kurniawan (2021:131), yang menjelaskan pentingnya koordinasi antara kepala sekolah, guru, dan tenaga pendukung dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, diperlukan pembagian peran dan tanggung jawab yang lebih jelas agar pengorganisasian pendidikan inklusif dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Islam Al-Azhar 10 Serang dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama peserta didik reguler dan mengikuti kegiatan akademik maupun nonakademik di sekolah. Secara umum, pembelajaran masih menggunakan kurikulum reguler yang berlaku bagi seluruh peserta didik. Namun, guru dan GPK melakukan penyesuaian terbatas berdasarkan kondisi serta kemampuan anak, terutama ketika peserta didik mengalami kesulitan memahami materi atau menyelesaikan tugas. Penyesuaian dapat dilakukan melalui penyederhanaan tugas, perubahan cara penyampaian materi, atau penyesuaian asesmen, misalnya dengan memberikan soal secara lisan. Meskipun demikian, sekolah belum menerapkan kurikulum dan rapor khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Penyesuaian capaian pembelajaran masih dilakukan secara terbatas dan sebagian besar bergantung pada peran GPK, sehingga adaptasi pembelajaran belum sepenuhnya menjadi sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan sekolah.

Dalam pelaksanaannya, GPK berperan mendampingi peserta didik sesuai kebutuhan, membantu memahami materi, serta melakukan modifikasi pembelajaran ketika diperlukan. Guru kelas tetap bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran seluruh peserta didik, sedangkan GPK memberikan dukungan tambahan kepada anak berkebutuhan khusus. Sekolah juga memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kegiatan sekolah, termasuk ekstrakurikuler dan perlombaan. Keikutsertaan mereka dalam kegiatan tersebut serta pemberian apresiasi atas prestasi yang dicapai menunjukkan adanya upaya sekolah untuk mendukung partisipasi dan pengembangan potensi anak. Namun, karena pembelajaran pada dasarnya masih mengikuti sistem reguler, penyesuaian terhadap kebutuhan individual peserta didik belum terlaksana secara menyeluruh. Kondisi ini sejalan dengan Salim (2010:32), yang menjelaskan bahwa sekolah inklusif perlu memodifikasi kurikulum berdasarkan kebutuhan individu peserta didik, termasuk materi, strategi pembelajaran, metode penilaian, media, dan target capaian. Holifurrahman (2020:275) juga menegaskan bahwa pengelolaan kurikulum inklusif memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi secara sistematis, dengan kerja sama guru kelas dan GPK dalam merancang pembelajaran adaptif.

Pengawasan dan evaluasi pendidikan inklusif dilakukan untuk memantau pelaksanaan pembelajaran, perkembangan peserta didik, serta kendala yang dihadapi selama proses pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dilaksanakan melalui diskusi dan koordinasi yang melibatkan kepala sekolah serta guru untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan tindak lanjut perbaikan. Pengawasan juga dilakukan secara berkala setiap semester dengan melibatkan pengawas dari Al-Azhar pusat. Kegiatan tersebut mencakup pemantauan langsung terhadap proses pembelajaran di kelas serta komunikasi dengan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengetahui kenyamanan dan pengalaman mereka selama belajar di sekolah. Hasil pengawasan menjadi bahan pertimbangan dalam menilai pelaksanaan layanan dan menentukan aspek yang perlu ditingkatkan. Temuan ini sejalan dengan Juhri (2023:426), yang menyatakan bahwa evaluasi program pendidikan inklusif diperlukan untuk mengetahui ketercapaian program, mengidentifikasi hambatan, dan menentukan tindak lanjut perbaikan. Hal tersebut juga sesuai dengan teori George R. Terry (2019), yang

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

memandang pengendalian sebagai proses mengawasi pelaksanaan kegiatan, membandingkan hasil dengan rencana atau standar, serta melakukan tindakan korektif agar tujuan organisasi tercapai.

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Islam Al-Azhar 10 Serang didukung oleh keterlibatan orang tua, komunikasi antara keluarga dan sekolah, keterbukaan guru, serta penerimaan teman sebaya. Orang tua berkontribusi melalui komunikasi mengenai perkembangan anak, pemberian dukungan selama proses pendidikan, dan penyediaan GPK sesuai kebijakan sekolah. Sementara itu, interaksi positif dengan teman sebaya membantu peserta didik berkebutuhan khusus merasa diterima dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Dukungan tersebut menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi proses belajar dan penyesuaian diri anak. Temuan ini sejalan dengan Bahri (2021:98–99), yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan pendidikan inklusif di sekolah dasar dipengaruhi oleh kerja sama kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua dalam membangun lingkungan yang menerima keberagaman. Putri dan Widiasmara (2025:130) juga menemukan hubungan antara dukungan teman sebaya dan penyesuaian diri peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Dengan demikian, dukungan keluarga, guru, dan teman sebaya merupakan bagian penting dalam menciptakan pengalaman pendidikan yang positif bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Meskipun terdapat dukungan dari berbagai pihak, pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, belum tersedianya fasilitas khusus yang memadai, serta belum meratanya pemahaman dan kompetensi guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Guru dan GPK juga belum memperoleh pelatihan atau lokakarya pendidikan inklusif secara memadai sehingga masih diperlukan penguatan pengetahuan dan keterampilan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik. Selain itu, pembelajaran dan sistem penilaian masih mengacu pada pola reguler, sedangkan modifikasi materi dan tugas lebih banyak dilakukan oleh GPK. Akibatnya, penyesuaian pembelajaran belum menjadi tanggung jawab bersama yang terintegrasi dalam sistem sekolah. Temuan ini sejalan dengan Mukti dkk. (2023), yang mengidentifikasi keterbatasan GPK, kompetensi guru reguler, pelatihan tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana sebagai hambatan dalam implementasi pendidikan inklusif.

Hambatan lainnya berkaitan dengan belum adanya struktur organisasi dan pembagian tugas pendidikan inklusif secara tertulis, belum terjalinnya kerja sama resmi dengan tenaga profesional atau lembaga pendukung, serta mekanisme penyediaan GPK yang masih diserahkan kepada orang tua. Sekolah belum memiliki kemitraan formal dengan psikolog, terapis, rumah sakit, atau lembaga layanan pendidikan inklusif yang dapat membantu asesmen, konsultasi, dan pendampingan peserta didik. Sementara itu, penyediaan dan pembiayaan GPK masih bergantung pada kemampuan orang tua serta kebijakan yang berlaku di sekolah. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakmerataan layanan pendampingan, terutama bagi keluarga yang mengalami keterbatasan sumber daya. Temuan ini sejalan dengan Minsih dkk. (2024:114), yang menekankan perlunya pembagian peran yang jelas serta kolaborasi antara kepala sekolah, guru kelas, GPK, orang tua, dan tenaga profesional, seperti psikolog, terapis, maupun pihak sekolah luar biasa. Yaasmin (2024:378) juga menjelaskan bahwa optimalisasi manajemen pendidikan inklusif ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, pembagian tugas yang jelas, serta kerja sama antara pihak sekolah dan pihak eksternal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Islam Al-Azhar 10 Serang telah berupaya menerapkan pendidikan inklusif melalui penerimaan peserta didik

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

berkebutuhan khusus, koordinasi antara sekolah dan orang tua, pendampingan dalam pembelajaran, pemberian kesempatan mengikuti kegiatan sekolah, serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi berkala. Dukungan orang tua, keterbukaan guru, dan penerimaan teman sebaya menjadi faktor penting yang membantu pelaksanaan program. Namun, tata kelola pendidikan inklusif masih perlu diperkuat melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai, pengembangan kurikulum dan pembelajaran adaptif, penetapan struktur organisasi serta pembagian tugas secara tertulis, dan pembentukan kemitraan dengan tenaga profesional. Penyediaan GPK juga perlu mendapat perhatian bersama agar layanan pendidikan tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan orang tua. Penguatan aspek-aspek tersebut diperlukan supaya penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berlangsung secara lebih terstruktur, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tata kelola sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif di SD Islam Al-Azhar 10 Serang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif telah berjalan melalui proses tata kelola sekolah yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pada aspek perencanaan, sekolah memiliki komitmen dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bagian dari memberikan hak pendidikan bagi seluruh anak tanpa diskriminasi. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan kebijakan sekolah, program penyesuaian, serta koordinasi antar pihak terkait dalam mendukung layanan pendidikan inklusif. Pada aspek pengorganisasian, tata kelola pendidikan inklusif di SD Islam Al-Azhar 10 Serang dilakukan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab antara kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, orang tua, serta guru pendamping khusus. Koordinasi antar tenaga pendidik menjadi bagian penting dalam peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pada aspek pelaksanaan, pelaksanaan pendidikan inklusif dilakukan melalui proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik berkebutuhan khusus bersama peserta didik reguler dalam lingkungan sekolah yang sama.

Sekolah berusaha menciptakan lingkungan belajar yang menerima keberagaman melalui dukungan guru, teman sebaya, serta warga sekolah. Dalam pelaksanaannya, guru melakukan penyesuaian pembelajaran sesuai dibantu dengan guru pendamping khusus dalam modifikasi pembelajaran dengan kondisi dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan optimal. Pada aspek pengawasan dan evaluasi, pelaksanaan pendidikan inklusif dilakukan melalui pemantauan secara berkala yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Evaluasi dilakukan melalui diskusi dan koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul serta menentukan solusi dan tindak lanjut perbaikan. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan proses pembelajaran dan komunikasi dengan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengetahui kenyamanan serta perkembangan mereka selama berada di sekolah.

Adapun faktor pendukung dalam terlaksananya pendidikan inklusif di SD Islam Al-Azhar 10 Serang yaitu terdapat dukungan besar yang diberikan oleh orang tua dalam mendukung proses pendidikan anak, sikap keterbukaan guru, dan penerimaan positif dari teman sebaya. Sedangkan faktor penghambat yang ditemukan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, belum meratanya pemahaman guru mengenai pendidikan inklusif, terbatasnya pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dalam

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

memberikan layanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, aspek kurikulum yang belum dimodifikasi, pembelajaran di lapangan yang masih disamakan, struktur organisasi sekolah yang belum ada secara tertulis, belum adanya kerjasama dengan pihak luar, dan rekrutmen guru pendamping khusus yang masih sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan diserahkan kepada orang tua.

Secara keseluruhan, tata kelola sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif di SD Islam Al-Azhar 10 Serang telah patut untuk diapresiasi karena telah menerima dan terbuka terhadap keberadaan dan hak peserta didik didik berkebutuhan khusus, serta telah terjalin adanya koordinasi dan komitmen dari orang tua, namun diperlukan penguatan terutama dalam aspek peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana, aspek kurikulum di kelas, pembagian tugas melalui struktur organisasi yang jelas, kerjasama dengan berbagai pihak, dan rekruitmen guru pendamping khusus yang harus saling kerjasama antara orang tua dan pigak sekolah serta pengembangan program pendidikan yang berkelanjutan agar layanan yang diberikan dapat semakin optimal

DAFTAR PUSTAKA

Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer 3*(1), 1–9.

Gemilang, G. S. (2016). METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING KEDIRI. *Jurnal Fokus Konseling2*(2).

Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi. *Jurnal At-Taqadum* 8 (1) 21–46.

Habibah, F., Puspa, M., Najma, H., & Zahra, I. Y. (2025). Perencanaan Strategis Dan Tata Kelola Lembaga Pendidikan Yang Terukur. J*urnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (2) 1013–1024.

Herawati, E. S. B., & Supriyana, H. (2024). Implementasi Fungsi Manajemen dalam Tata Kelola Kurikulum di Sekolah. *Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah*, *5*(1), 20.

Holifurrahman. (2020). Kurikulum modifikasi dalam praktik pendidikan inklusif di SD Al-Firdaus. INKLUSI, 7(2), 275.

Ikramullah, & Sirojuddin, A. (2020). Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* , *1*(2), 131–139.

Mayya, M. Sa'ud, S, U, Meirawan D. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar 3. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, *26*(1), 108–117.

Mukti H, Aryana, P, , B, I., & Danten, N. (2023) Analisis Pendidikan Inklusif : Kendala Dan Solusi Dalam Implementasinya *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humanora* , (KAGANGA) (6) 764-772.

Minsih, Rusnilawati, Mujahid, I., Kaltsum, H. U., Tadzkiroh, U., Raisia, A., Uslan, & Triwahyuni, E. (2024). Pendampingan kurikulum modifikatif bagi guru di sekolah dasar inklusi. Buletin KKN Pendidikan, 6(1), 114.

Putri, A. S., & Widiasmara, N. (2025). Dukungan teman sebaya dan penyesuaian diri siswa berkebutuhan khusus: Studi pada sekolah inklusi di Yogyakarta. Proyeksi, 20(2)

Ramadhan, F., Istiqamah, F., & Jannah, Z, M., (2025). Peran Kepala Sekolah Dalam Menunjang Tata Kelola Satuan Pendidikan Melalui Pengambilan Keputusan Di Sekolah Dasar. *Jurnal Media 3*(6).

Salim, A. (2010). Pengembangan model modifikasi kurikulum sekolah inklusif berbasis kebutuhan individu peserta didik. *Jurnal Pendidikan dan*

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Kebudayaan, 16(7), 32–34. *Edification Journal*: Pendidikan Agama Islam, 4(2), 278.

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFETA, Bandung.

Wijoyo, H. (2022). Analisis teknik wawancara (pengertian wawancara, bentuk-bentuk pertanyaan wawancara) dalam penelitian kualitatif bagi mahasiswa teologi dengan tema pekabaran injil melalui penerjemahan alkitab.A*cademia Edu* 1–10.

Yaasmin, L. S. (2024). Mengoptimalkan manajemen kurikulum untuk pendidikan inklusif di sekolah dasar. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar,* 6(3), 378–380.